

**MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (PERUBAHAN RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2010-2015**

**VISI** : MASYARAKAT CILEGON SEJAHTERA MELALUI DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA  
**MISI 5** : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERKEADILAN, DEMOKRATIS, BERLANDASKAN HUKUM SERTA BERORIENTASI PUBLIK  
**AGENDA 5** : CILEGON BERWIBAWA

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM			SKPD PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI	PERKIRAAN	TARGET			TRANSISI		KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016					
Tujuan 5.1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik													
Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan													
	Nilai kinerja pemerintah daerah	Peringkat	C	C	C	C	C	B					
									Strategi 5.1.1.1 : Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur				
									Arah Kebijakan 5.1.1.1.1 : Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, sarana dan parasana aparatur, tata kelola manajemen serta memenuhi kebutuhan minimal operasional penyelenggaraan pemerintahan				
										1 01	Pendidikan		
										1 01 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Pendidikan	
										1 02	Kesehatan		
										1 02 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Kesehatan	
										1 02	Kesehatan		
										1 02 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Rumah Sakit Umum Daerah	
										1 03	Pekerjaan Umum		
										1 03 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum	
										1 05	Penataan Ruang		
										1 05 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Tata Kota	
										1 06	Perencanaan Pembangunan		
										1 06 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
										1 07	Perhubungan		
										1 07 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Perhubungan	
										1 08	Lingkungan Hidup		
										1 08 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Badan Lingkungan Hidup	
										1 08	Lingkungan Hidup		

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM		
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI	PERKIRAAN	TARGET			TRANSISI		KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB
			2011	2012	2013	2014	2015	2016				
										1 08 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
										1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil	
										1 10 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
										1 11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
										1 11 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan
										1 13	Sosial	
										1 13 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Sosial
										1 14	Ketenagakerjaan	
										1 14 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Tenaga Kerja
										1 16	Penanaman Modal	
										1 16 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (Kantor Penanaman Modal)
										1 17	Kebudayaan	
										1 17 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
										1 18	Kepemudaan dan Olahraga	
										1 18 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Pemuda dan Olahraga
										1 19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
										1 19 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Sekretariat Daerah (Bag Pengendalian Program; Bag Umum; Bag Keuangan; Bag Perlengkapan)
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Sekretariat DPRD
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM			SKPD PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI	PERKIRAAN	TARGET			TRANSISI		KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016					
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Inspektorat	
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Kecamatan Cilegon	
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Kecamatan Ciwandan	
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Kecamatan Cibeber	
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Kecamatan Grogol	
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Kecamatan Pulomerak	
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Kecamatan Purwakarta	
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Kecamatan Jombang	
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Kecamatan Citangkil	

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM			SKPD PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI	PERKIRAAN	TARGET			TRANSISI		KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016					
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Kantor Pemadam Kebakaran	
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Badan Kepegawaian dan Diklat	
										1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
										1 20 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	
										1 22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
										1 22 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan	
										1 26	Perpustakaan		
										1 26 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	
										2 01	Pertanian		
										2 01 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Pertanian dan Kelautan	
										2 07	Industri		
										2 07 01	Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	
Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap tingkat pelayanan pemerintah daerah													
	Indeks kepuasan masyarakat	Point	68,64	69,00	70,00	71,00	72,00	73,00					
									Strategi 5.1.2.1 : Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan umum				
									Arah Kebijakan 5.1.2.1.1 :	1 20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		
									Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan umum	1 20 03	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	Sekretariat Daerah (Bag Pemerintahan)	
									Arah Kebijakan 5.1.2.1.2 : Meningkatkan pelayanan dan pembinaan administrasi pertanahan	1 09 02	Pertanahan		
										1 09 02	Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan dan Penggunaan Tanah	Sekretariat Daerah (Bag Pemerintahan; Bag Perlengkapan)	
									Arah Kebijakan 5.1.2.1.3 : Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan				

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM			SKPD PENANGGUNG JAWAB		
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI	PERKIRAAN	TARGET			TRANSISI		KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM				
			2011	2012	2013	2014	2015	2016							
										1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Kecamatan Cilegon		
										1	20	13		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Ciwandan
										1	20	13		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Cibeber
										1	20	13		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Grogol
										1	20	13		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Pulomerak
										1	20	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		Kecamatan Purwakarta	
										1	20	13		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan Jombang
										1	20	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan		Kecamatan Citangkil	
										Arah Kebijakan 5.1.2.1.3 :	1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat Daerah (Bag Organisasi)
											1	20		05	
									Arah Kebijakan 5.1.2.1.4 :	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat DPRD		
										Meningkatkan pelayanan lembaga legislatif daerah	1	20		21	Program Peningkatan Pelayanan Lembaga Legislatif Daerah
									1		20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian			
									1		20	08		Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan Daerah	
									Arah Kebijakan 5.1.2.1.5 :	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Sekretariat Daerah (Bag Perlengkapan)		
										1	20	02		Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	
									Meingkatkan perencanaan kebutuhan perlengkapan daerah yang efektif dan efesien serta inventarisasi, pemeliharaan dan pengelolaan asset daerah	1	03	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum		
										1	03	05		Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Negara	
									Arah Kebijakan 5.1.2.1.6 : Memenuhi kebutuhan minimal penyediaan gedung kantor SKPD	1	24	Kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah		
										1	24	15		Program Pengembangan Arsip Daerah	

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM			SKPD PENANGGUNG JAWAB			
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI	PERKIRAAN	TARGET			TRANSISI		KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016								
									Arah Kebijakan 5.1.2.1.8 :	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat			
									Meningkatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan SDM aparatur	1	20	14		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		
									Arah Kebijakan 5.1.2.1.9 :	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian				
									Meningkatkan sistem kualitas Diklat	1	20	15		Program Peningkatan Sistem, Kualitas dan Evaluasi Diklat	Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat	
									Arah Kebijakan 5.1.2.1.10 :	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat		
									Meningkatkan penataan dan pengolahan sistim adminstrasi kepegawaian	1	20	16			Program Peningkatan Administrasi Kepegawaian	
									Arah Kebijakan 5.1.2.1.11 :	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian				
									Meningkatkan pengendalian Program Pembangunan	1	20	06			Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Sekretariat Daerah (Bag Pengendalian Program)
									Arah Kebijakan 5.1.2.1.12 :	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian			Inspektorat	
Meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan	1	20	12	Program Peningkatan Pengawasan Pembangunan Daerah												
Sasaran 5.1.3 :																
Meningkatnya pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah																
	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP/ WDP/ TMP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP								
									Strategi 5.1.3.1 : Peningkatan kapasitas pendapatan dan tata kelola keuangan daerah							
									Arah Kebijakan 5.1.3.1.1 :	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah			
									Mengoptimalkan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah yang efektif dan efesien	1	20	08		Program Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan Daerah		
									Arah Kebijakan 5.1.3.1.2 :	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian		Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah		
									Mengoptimalkan penerimaan sumber- pendapatan daerah dan pengelolaan keuang daerahdari pajak	1	20	09	Program Peningkatan Pajak Daerah			

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM			SKPD PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI	PERKIRAAN	TARGET			TRANSISI		KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016					
									Arah Kebijakan 5.1.3.1.3 :	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
								Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yg efektif dan efesien	1	20	10 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah		
									Arah Kebijakan 5.1.3.1.4 :	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
								Mengoptimalkan perencanaan dan Pengendalian keuang daerah yg efektif dan efesien	1	20	11 Program Perencanaan dan Pengendalian dana Perimbangan		
Sasaran 5.1.4 : Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah													
	Ketersediaan Peraturan Walikota tentang RKPD tahunan tepat waktu	Dokumen	1	1	1	1	1	1					
	Ketersediaan Perda RPJMD, RPJPD, dan RTRW	Dokumen	3	3	3	3	3	3					
									Strategi 5.1.4.1 : Peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi pembnagunan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah				
									Arah Kebijakan 5.1.4.1.1 : Meningkatkan kualitas Informasi pembangunan daerah	1	23	Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
										1	23	02 Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik Daerah	
									Arah Kebijakan 5.1.4.1.2 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan daerah	1	06	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
										1	06	02 Program Perencanaan Umum Pembangunan Daerah	
									Arah Kebijakan 5.1.4.1.3 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi daerah	1	06	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
										1	06	03 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
								Arah Kebijakan 5.1.4.1.4 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan sosial dan pemerintahan daerah	1	06	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
									1	06	04 Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan		
								Arah Kebijakan 5.1.4.1.5 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan rencana pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	1	06	Perencanaan Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
									1	06	05 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah		
Sasaran 5.1.5 : Meningkatnya akes masyarakat terhadap pelayanan informasi daerah yang berkualitas													
	Tingkat kualitas aksebilitas masyarakat terhadap pelayanan informasi daerah	Poin	75,01	76,31	77,61	78,91	80,21						

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM				SKPD PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI	PERKIRAAN	TARGET			TRANSISI		KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM			
			2011	2012	2013	2014	2015	2016						
									Strategi 5.1.5.1 : Peningkatan pelayanan informasi daerah					
									Arah Kebijakan 5.1.5.1.1 : Meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas informasi daerah	1	25		Komunikasi dan Informatika	
										1	25	02	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Daerah	Sekretariat Daerah (Bag Komunikasi dan Informasi)
Sasaran 5.1.6 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil														
	Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan	Hari kerja	2	2	2	2	2	2						
	Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pencatatatan sipil	Hari kerja	3	3	3	3	3	3						
	Rasio jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP	%	88,17	98,70	98,71	98,73	98,75	98,76						
									Strategi 5.1.6.1 : Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil					
									Arah Kebijakan 5.1.6.1.1 : Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil	
										1	10	02	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
									Arah Kebijakan 5.1.6.1.2 : Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil yang berkualitas	1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil	
										1	10	03	Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
									Arah Kebijakan 5.1.6.1.3 : Meningkatkan data dan informasi kependudukan	1	10		Kependudukan dan Catatan Sipil	
										1	10	04	Program Peningkatan Data dan Informasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tujuan 5.2 : Meningkatkan ketentraman, kertiban dan perlindungan masyarakat														
Sasaran 5.2.1 : Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat														
	Tingkat pemenuhan produk hukum daerah	%	100	100	100	100	100	100						
	Tingkat pemenuhan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100						
									Strategi 5.2.1.1 : Pemenuhan dan peningkatan kualitas produk hukum daerah					
									Arah Kebijakan 5.2.1.1.1 : Memenuhi kebutuhan produk dan bantuan hukum	1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
										1	20	04	Program Penataan dan Pengembangan Produk Hukum Daerah	Sekretariat Daerah (Bag Hukum)
Sasaran 5.2.2 : Meningkatnya kerukunan hidup umat beraqama														



TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM			SKPD PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI	PERKIRAAN	TARGET			TRANSISI		KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM		
			2011	2012	2013	2014	2015	2016					
	Tingkat penyelesaian kasus SARA yang difasilitasi oleh pemda	%	100	100	100	100	100	100					
									Strategi 5.2.2.1 : Fasilitasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan kerukunan hidup beragama Arah Kebijakan 5.2.2.1.1 :  Meningkatkan pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan	1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
										1	19	02 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Sasaran 5.2.3 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta peneqakan hukum daerah													
	Tingkat penyelesaian jumlah pelanggaran perda yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100					
	Rata rata jumlah kasus terkait trantibmas Kota Cilegon yang tertangani terhadap jumlah total kasus	%	100	100	100	100	100	100					
	Rata rata jumlah kasus pelanggaran perda yang tertangani terhadap jumlah total kasus pelanggaran perda	%	100	100	100	100	100	100					
									Strategi 5.2.3.1 : Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan pembinaan kelembagaan politik dan kemasyarakatan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Arah Kebijakan 5.2.3.1.1 :  Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban  Arah Kebijakan 5.2.3.1.2 :  Meningkatkan pembinaan kelembagaan politik dan kemasyarakatan serta penanggulangan konflik	1	20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	
										1	20	18 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
									1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
									1	19	03 Program Peningkatan LSM dan ORMAS	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	
Sasaran 5.2.4 : Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bencana													
	Persentase jumlah kasus bencana yang dapat ditangani	%	100	100	100	100	100	100					
									Strategi 5.2.4.1 : Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penananggulangan bencana Arah Kebijakan 5.2.4.1.1 :  Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	

TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN KINERJA SASARAN								STRATEGI/ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM			SKPD PENANGGUNG JAWAB	
	INDIKATOR	SATUAN INDIKATOR	REALISASI	PERKIRAAN	TARGET			TRANSISI		KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM			
			2011	2012	2013	2014	2015	2016						
									Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana	1	19	04	Program Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
									Arah Kebijakan 5.2.4.1.2 :	1	20		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	
									Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran	1	20	05	Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kantor Pemadam Kebakaran